

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, dkk. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. *Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara*. Jakarta.

Kamus Pusat Bahasa, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Anggaran dan Belanja Negara*. Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja*. Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan*. Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan*. Jakarta.

KPPN. 2018. *Profil KPPN Padang Tahun 2018*. Padang : KPPN.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.

